

Dua Dasawarsa Gerakan Antikorupsi Pasca-Reformasi

Luky Djani

Ikhtiar pemberantasan korupsi akan selalu menemui jalan terjal. Upaya memerangi korupsi juga akan berhadapan langsung dengan para koruptor yang berkumpun dalam wadah terorganisasi; memiliki semacam daya survival karena tidak jarang menggunakan institusi atau instrumen negara dan didukung oleh sumber daya finansial. Dalam konteks itu, gerakan antikorupsi yang telah beroperasi selama dua puluh tahun terakhir mengalami sejumlah pasang-surut. Tulisan ini merupakan refleksi kritis terhadap pergulatan gerakan antikorupsi selama dua dasawarsa pasca-Orde Baru. Pandangan penulis terhadap gerakan antikorupsi kontemporer lebih mendekati karakter "social non-movement" dan mengusung nilai-nilai moralitas.

Kata Kunci: demokratisasi, *good governance*, korupsi, non-gerakan sosial, rezim hibrida

Dua windu sudah kita terlepas dari rezim otoriter. Ekspektasi publik akan kehadiran tatanan yang demokratis dan berkeadilan tidaklah berlebihan. Pada kenyataannya, tuntutan perubahan, terutama "pemerintahan yang bebas dari KKN", belum sepenuhnya hadir. Seharusnya demokrasi menjadi vaksin ampuh guna meredam korupsi. Para oligark jelas memanfaatkan ruang dari pelembagaan sistem hibrida dan merenggangnya relasi representasi politik untuk kembali mendominasi institusi dan ruang publik. Penjelasan mengapa korupsi dapat beradaptasi dalam sistem demokrasi liberal memerlukan refleksi kritis.¹

Apakah agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air mengalami kemandekan? Mengapa peluang keterbukaan politik belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat sipil

dalam upaya mendorong pemerintahan bebas korupsi? Tulisan ini merupakan refleksi kritis terhadap perjalanan gerakan antikorupsi dalam menghadirkan tatanan politik dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Kerangka analisis pada tulisan ini menggunakan studi literatur untuk menelaah konsep serta pendekatan anti korupsi dominan yang menjadi rujukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Referensi juga memberikan ilustrasi pengalaman gerakan antikorupsi dari beberapa negara. Penulis melakukan observasi terhadap salah satu inisiatif gerakan pencegahan korupsi yang berkembang di daerah.

Ulasan pada tulisan ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama membahas rezim hibrida yang merupakan asimilasi dari karakter sistem otoritarian dan predatoris dengan sistem demokratis. Model hibrida itu didominasi sekaligus diperebutkan antar-kelompok atau klan politik demi mempertahankan dominasi atas akses pada sumber daya. Bagian kedua mem-

¹ Adrian Leftwich, "Governance, Democracy and Development in the Third World", dalam *Third World Quarterly*, Vol. 14, No. 3, 1993, hal. 605-624.

bahas pendekatan arus utama dalam pemberantasan korupsi, yakni pembenahan kelembagaan.

Bagian ketiga mengupas landasan ideologi dari gerakan antikorupsi di Indonesia yang bertumpu pada nilai dan argumentasi moral dalam rancangan program dan implementasinya. Pada bagian itu karakteristik gerakan sebagai organisasi atau lembaga ditinjau secara kritis dengan menggunakan kerangka teori non-gerakan sosial, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Asef Bayat, sarjana politik ahli Timur Tengah. Pada bagian selanjutnya penulis memberikan penilaian terhadap karakter gerakan antikorupsi di Tanah Air dengan mengklasifikasinya sebagai non-gerakan sosial. Implikasi dari model itu kemudian dipaparkan dengan melihat dampaknya terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi maupun demokratisasi. Bagian terakhir merupakan usulan untuk reorientasi gerakan antikorupsi di Indonesia agar sinergi dengan demokratisasi—penguatan representasi politik populer—dan gerakan sosial (lama) yang telah hadir sebelumnya.

Dari ulasan tersebut dapat dipahami bahwa pendekatan *governance reform* tidak membongkar konfigurasi serta relasi negara-kapital dan relasi negara-masyarakat yang berujung pada dominasi kelompok *politico-business* atas institusi publik dan sumber daya publik. Karena itu, gerakan antikorupsi harus bergandeng tangan dengan gerakan sosial lainnya untuk memutus defisit demokrasi. Perbaikan representasi politik memiliki potensi untuk menggunakan pranata dan infrastruktur kelembagaan demokrasi, sehingga meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada menurunnya korupsi.

Defisit Demokrasi: Rezim Hibrida dan *Competitive Oligarchy*

Reformasi tatanan dan sistem politik di Indonesia melalui pendekatan *political reform* dan *institutional reform* berlangsung sejak 1999. Pendekatan reformasi politik dan kelembagaan

menggunakan konsepsi *good governance* sebagai arus utama perubahan. Pendekatan itu diyakini akan membuat demokrasi lebih mengakar, alokasi sumber daya (ekonomi) menjadi lebih efisien, serta pemerintahan yang responsif dan berkeadilan. Akan tetapi, konsistensi dan karakter politik pascarezim Orba ternyata masih didominasi relasi negara dan kapital bercorak "kapitalis konco" serta hubungan antara negara dengan masyarakat bersifat klientelistik.²

Situasi tersebut oleh beberapa pihak dikategorikan sebagai "defisit demokrasi." Kondisi dan fenomena tersebut terbentuk dari residu pola relasi klientelistik, eksploitatif, dan koruptif. Menurut beberapa ilmuwan politik, demokratisasi telah digunakan dan dimanipulasi oleh kepentingan oligarki dengan menguasai lembaga-lembaga publik melalui wahana demokrasi elektoral.³ Reforma sistem politik hanya sebatas perubahan sistem pemilu tempat kompetisi antar-klan/kelompok politik dengan dukungan oligarki, sehingga yang terjadi justru *competitive oligarchy*.⁴ Kontestasi elektoral merupakan persenyawaan antara kepentingan penguasa politik dan penguasa ekonomi dengan negara

² Edward Aspinall, "Indonesia: the Irony of Success", dalam *Journal of Democracy*, Vol. 21, No. 2, 2010, hal. 20-34.

³ Lihat, Richard Robison dan Vedi R Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (London: Routledge-Curzon, 2004); Jeffrey A Winters, *Oligarchy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011); Luky Djani dan Putut Arya Saputro, "Membaca Relasi Negara dan Kapital di Tingkat Lokal: Sebuah Tawaran Kerangka Analisis", dalam *Prisma*, Vol. 32, No. 1, 2013, hal. 107-120; Yuki Fukuoka dan Luky Djani, "Revisiting the Rise of Jokowi: The Triumph of Reformasi or an Oligarchic Adaptation of Post-Clientist Initiatives?", dalam *South East Asia Research*, Vol. 24, No. 2, 2016, hal. 204-221; Vedi R Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* (Stanford: Stanford University Press, 2010).

⁴ Lihat, Fukuoka dan Djani, "Revisiting the Rise of Jokowi..."; Winters, *Oligarchy*...

menjadi instrumen untuk mengukuhkan kekuasaan dan mengakumulasi kapital. Sungguh ironis, "demokratisasi" menjadi wahana bagi oligarki untuk mengakumulasi kekuasaan dan kapital.

Sarjana politik lainnya menjelaskan defisit demokrasi dengan merujuk pada model rezim hibrida.⁵ Rezim itu merupakan produk asimilasi antara rezim otoritarian dengan kerangka liberalisasi politik dan ekonomi. Rezim hibrida tidak bisa dikatakan otoritarian layaknya kebanyakan pemerintahan non-demokratis, tetapi juga tidak dapat dikatakan demokratis (liberal) seperti di beberapa negara demokrasi mapan (*matured democracy*). Rezim hibrida justru menjadi terkonsolidasi dan ironisnya mampu beradaptasi dalam kerangka demokrasi liberal dan *good governance*.

Kemunculan rezim hibrida seperti itu tidaklah mengherankan karena memang telah dirancang oleh para elite predator sejak awal Reformasi.⁶ Elite saat itu secara cermat memanfaatkan peluang dengan melakukan negosiasi dalam menentukan arah "transisi", sehingga

dapat dengan mudah menyelamatkan aset dan jaringan politik.⁷ Kesepakatan atas "pakta transisi" itu menyangkut tuntutan terpenting dari gerakan reformasi, pemberantasan korupsi, yang dalam perumusannya telah diperlunak, sehingga dampaknya secara fundamental tidak akan mengganggu kepentingan dan posisi politik dan ekonomi para oligark. Karena itu, tidak mengherankan jika upaya antikorupsi, dan juga agenda reformasi utama lainnya, menjadi tumpul.

Penjelasan ketiga mengenai defisit demokrasi menggunakan sudut pandang renggangnya representasi politik. Pendekatan itu menekankan bahwa penyimpangan kekuasaan, termasuk korupsi, karena politikus tidak "terikat" tali mandat dengan konstituen. Tanpa ikatan mandat yang spesifik, politikus menjadi lebih otonom sehingga dapat membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Pada celah itulah relasi kolusif dan koruptif dapat terjadi di antara politikus dan pengusaha.

Ketiga penjelasan di atas saling berhubungan dan mengilustrasikan bagaimana defisit demokrasi terjadi. *Good governance*, demokratisasi, dan desentralisasi justru menopang munculnya rezim hibrida tempat para oligark menggunakan wahana dalam demokratisasi.⁸ Demokratisasi, promosi akuntabilitas, dan penegakan hukum yang pada awalnya sempat membuat oligarki khawatir akan kelanjutan eksistensi mereka (dalam politik dan bisnis), saat ini justru merasa nyaman dengan konstelasi yang

⁵ Definisi rezim hibrida (*hybrid regime*) dirumuskan Garry Rodan dan Kanisha Jayasuriya sebagai "regimes with a combination of both authoritarian and democratic elements. Political regimes need to be identified and explained in terms of organization of conflict through various modes of political participation. An apparent paradox is discernable across much of the region (Southeast Asia) whereby more political participation is often accompanied by less political contestation"; lihat, Garry Rodan dan Kanishka Jayasuriya "Beyond Hybrid Regimes: More Participation, Less Contestation in South East Asia", dalam *Democratization*, edisi khusus, Vol. 14, No. 5, Desember 2007, hal. 768, 773-774.

⁶ Lihat, Gerry van Klinken, "How a Democratic Deal Might be Struck", dalam Arief Budiman, Barbara Hatley, dan Damien Kingsbury (eds.), *Reformasi: Crisis and Change in Indonesia* (Melbourne: Monash Asia Institute, 1999); Olle Tornquist, "Assessing Democracy from Below: A Framework on Indonesian Pilot Study", dalam *Democratization*, Vol. 13, No. 2, 2006, hal. 227-255.

⁷ Arief Budiman, "The 1998 Crisis: Change and Continuity in Indonesia", dalam Arief Budiman, Barbara Hatley, dan Damien Kingsbury (eds.), *Reformasi, Crisis and Change in Indonesia* (Clayton: Monash Asia Institute, 1999), hal. 41-58.

⁸ Richard Robison, "Strange Bedfellows: Political Alliances in the Making of Neo-liberal Governance", dalam Wil Hout dan Richard Robison (eds.), *Governance and the Depoliticisation of Development* (London: Routledge, 2009), hal. 15-28.

terbentuk pasca-Orba.⁹ Korupsi tetap ada karena korupsi memainkan peran fungsional dalam sistem politik, terutama dalam memoderasi relasi antar-kelompok politik di masa transisi.¹⁰

Pembenahan Kelembagaan sebagai Rujukan Gerakan Antikorupsi

Konsep *good governance* (GG) telah mendominasi wacana dan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi. Konsep ini dianggap sebagai solusi kemandekan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara yang terbelit problem penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, hingga inkompetensi kelembagaan.¹¹ Bank Dunia meyakini, tanpa *governance* yang baik maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sulit dicapai. Pun dengan pembenahan kompetensi kelembagaan ditunjang oleh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi serta *rule of law*, maka korupsi akan sirna. Sayangnya, meski ada beragam proyek berlabel GG, korupsi tetap belum dapat dijinakkan.

Di beberapa negara, bukti empiris berkata lain. Upaya perubahan tata kelola pemerintahan yang digabungkan dengan reformasi ekonomi (privatisasi, deregulasi, debirokratisasi) justru mendatangkan hasil sebaliknya: *bad governance* yang ditandai dengan kembalinya elite-elite predator.¹² Perubahan yang dihadirkan tidak

mengubah kondisi struktural yang menjadi akar masalah. Ironisnya, para elite justru mendukung skema *good governance* yang sesungguhnya membahayakan kelangsungan eksistensi mereka.

Anomali itu adalah, *pertama*, karena konsep GG mengenyampingkan dimensi politik. Padahal, korupsi adalah bentuk penyimpangan kekuasaan akibat dari kompetisi politik.¹³ Konsep GG tidak mempermasalahkan legitimasi suatu rezim, karakter politik serta proses formulasi kebijakan publik.¹⁴ Yang dipromosikan adalah munculnya kepercayaan pasar pada otoritas politik dan lembaga negara yang bersih dan efisien.¹⁵ Di sinilah terlihat tumpahnya GG: membahas *governance* tanpa menyentuh isu-isu kunci seperti relasi kuasa, hak warga (*economic and social rights*), serta distribusi sumber daya.

ary Politics': The State, Democratization and Mozambique's Unstable Liberalization", dalam *Third World Quarterly*, Vol. 20, No. 3, 1999, hal. 537-551; Barbara Harriss-White dan Gordon White, "Corruption, Liberalization and Democratization", dalam *IDS Bulletin*, Vol. 27, No. 2, 1996, hal. 1-5; Robison dan Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia...*; Steven Sampson, "Integrity Warriors: Global Morality and the Anti-Corruption Movement in the Balkans", dalam Dieter Haller dan Cris Shore (eds.), *Corruption: Anthropological Perspectives* (Ann Arbor: Pluto Press, 2005), hal. 103-130.

¹² Alina Mungiu-Pippidi, "Corruption: Diagnosis and Treatment", dalam *Journal of Democracy*, Vol. 17, No. 3, 2006, hal. 86-100; David Nelken dan Michael Levi (eds.), *The Corruption of Politics and the Politics of Corruption* (Oxford: Blackwells, 1999); Mark E Thompson, "The Dialectic of 'Good Governance' and Democracy in Southeast Asia: Globalized Discourses and Local Responses", dalam *Globality Studies Journal*, No. 10, 2007, hal. 1-21.

¹⁴ Lihat, Ved P Nanda, "The 'Good Governance' Concept Revisited", dalam *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 603, No. 1, 2006, hal. 269-283; Martin R Doornbos, "Good Governance: The Pliability of a Policy Concept", dalam *Trames*, Vol. 8, No.4, 2004.

¹⁵ Lihat, Nanda, "The 'Good Governance' Concept...".

⁹ Lihat, Christian Chua, *Chinese Big Business in Indonesia: The State of Capital* (New York: Routledge, 2008).

¹⁰ Robert Williams, "New concepts for Old?", dalam *Third World Quarterly*, Vol. 20, No. 3, 1999, hal. 510.

¹¹ Larry Diamond, "Institutions of Accountability". (Washington DC: Hoover Press No. 3, 1999), dalam <http://www.hoover.org/publications/digest/3512991.html> (diakses 23 Februari 2008).

¹² Pinar Bedirhanoglu, "The Neoliberal Discourse on Corruption as a Means of Consent Building: Reflections from Post-Crisis Turkey", dalam *Third World Quarterly*, Vol. 28, No. 7, 2007, hal. 1239-1254; Graham Harrison, "Corruption as 'Bound-

Kedua, implementasi GG ditunjang dengan bantuan (proyek) dari donor, sehingga tentu saja diminati oleh para penguasa, baik pusat maupun daerah. Pengalaman selama ini menunjukkan kehadiran "champion" dikarenakan, selain mendapatkan bantuan (proyek maupun teknis) bagi daerah, juga dapat mendongkrak reputasi sehingga (diharapkan) akan menjadi "modal" penting saat pemilu mendatang. Pengalaman negara-negara bekas Uni Soviet menunjukkan bahwa pengadopsian *good governance* hanyalah siasat untuk menarik sebanyak-banyaknya bantuan donor.¹⁶

Ketiga, merujuk pada filosofi GG yang merupakan "gerakan akuntabilitas moral" atau "ethical globalization".¹⁷ Program dan kampanye antikorupsi membingkai korupsi sebagai masalah moralitas individu. Orientasi utamanya terletak pada penguatan maupun reformasi kelembagaan yang dibutuhkan guna menunjang sistem ekonomi pasar semata.¹⁸ Secara politis, program-program antikorupsi yang dilandasi kerangka moralitas bersifat taktis karena diharapkan dapat membentuk koalisi besar aktor dari beragam spektrum yang mungkin menolak atau menentang agenda yang lebih demokratis atau progresif. Kerangka non-ideologis itu

berarti bahwa sasaran reformasi transformatif untuk mengatasi ketidaksetaraan kekuasaan dan kepemilikan sumber daya dalam masyarakat lebih sulit dicapai.

Kritik terhadap strategi pemberian insentif kelembagaan dan personal pada institusi publik serta aktivitas pemantauan sebagai turunan dari *good governance* telah berulang kali dilontarkan.¹⁹ Dengan demikian, pandangan bahwa "akar" korupsi sebagai penyimpangan individu ketimbang "kejahatan terorganisasi"²⁰ membuat fokus pencegahan dan penegakan hukum lebih mempromosikan nilai-nilai keterbukaan, insentif (material dan promosi jabatan), dan akuntabilitas teknokratis.²¹

Walhasil, proyek-proyek *governance reforms* yang diusung sejumlah lembaga donor tidak membongkar fondasi kekuasaan elite predator serta penguasaan sumber daya ekonomi mereka. Tidak mengherankan jika oligark merasa nyaman dengan konsepsi *good governance* yang tidak menyentuh struktur kekuasaan dan basis ekonomi mereka. *Good governance* bahkan menopang munculnya para elite predator yang mendominasi proses demokratisasi dengan penguasaan institusi serta sumber daya publik.

Gerakan Antikorupsi: Antara Ideologi Moral dan *Social non-Movement*

Dua dekade demokratisasi pasca-lengsernya Soeharto perlu direfleksikan secara kritis. Apakah telah terjadi perubahan struktural dalam upaya menciptakan *democratic govern-*

¹⁶ Heather Marquette, "The Creeping Politicisation of the World Bank: The Case of Corruption", dalam *Political Studies*, Vol. 52, No. 3, 2004, hal. 413-430.

¹⁷ Lihat, Garry Rodan dan Caroline Hughes, *The Politics of Accountability in Southeast Asia: The Dominance of Moral Ideologies* (Oxford: Oxford University Press, 2014); Sampson, "Integrity Warriors...".

¹⁸ Lihat, Bruce L. Benson dan John Baden, "The Political Economy of Government Corruption: The Logic of Underground Government", dalam *The Journal of Legal Studies*, Vol. 14, No. 2, 1985, hal. 391-410; Gurharpal Singh, "Corruption, Transparency and the Good Governance Agenda in India", Makalah diajukan pada the EU-India: Beyond the New Delhi Summit, European Institute for Asian Studies, 2003; Angela Wood, *Demystifying "Good Governance": An Overview of World Bank Governance Reform and Conditions* (Dublin: Trocaire, 2005).

¹⁹ Lihat, Heather Marquette dan Caryn Peiffer, "Corruption and Collective Action", Developmental Leadership Program (DLP) Research Paper 32, dalam <http://publications.dlprog.org/CorruptionandCollectiveAction.pdf>.

²⁰ William Reno, "Anti-Corruption Efforts in Liberia: Are they Aimed at the Right Targets?", dalam *International Peacekeeping*, Vol. 115, 2008, hal. 387-404.

²¹ Lihat, Reno, "Anti-Corruption Efforts in Liberia...".

ance selama dua puluh tahun terakhir? Karena itu, penting untuk menela apakah gerakan anti-korupsi telah menciptakan fondasi bagi terciptanya perubahan sosial. Sulit dimungkiri, pengaruh gerakan antikorupsi dewasa ini cenderung melemah jika dibandingkan dengan awal tahun 2000-an. Jika pada periode awal tersebut marak organisasi non-pemerintah (ornop) anti-korupsi yang mengungkap kasus skandal korupsi, pada fase selanjutnya aktivitas lebih ditekankan pada "pemantauan" yang mengkritisi kebijakan publik berkombinasi kerja sama dengan institusi serta penyelenggara pemerintahan. Pada paruh dekade kedua pasca-Orde Baru, inisiatif dan upaya yang selama itu dilakukan berulang-ulang mengalami stagnasi bahkan pengaruhnya cenderung menurun. Mengapa terjadi penurunan daya tekan gerakan yang menuntut pemerintahan bersih dan tanpa korupsi?

Melemahnya gerakan ornop antikorupsi dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, surutnya pengaruh gerakan antikorupsi berbanding lurus dengan restorasi kekuasaan. Menurut Arief Budiman, keberhasilan gerakan prodemokrasi sesaat setelah Soeharto tumbang dikarenakan melemahnya kelompok elite dominan semasa Orde Baru karena sedang menata ulang jaringan politik dan bisnis serta basis sosial dalam masa transisi.²² Perubahan struktural politik dan ekonomi membuka persaingan antar-kelompok elite, sehingga memberi celah bagi masyarakat sipil untuk mendorong agenda perubahan. Setelah rekonsolidasi kekuasaan politik dan bisnis rampung dan lembaga publik kembali dalam kontrol para elite, maka ruang politik (*political space*) bagi masyarakat sipil dipersempit.²³ Demokratisasi yang membuka ruang publik justru dimanfaatkan oleh kelompok oligarki.

Kedua, pada dasarnya agenda pembaruan tata kelola pemerintahan, antikorupsi, dan reformasi penegakan hukum yang diusung

bersifat non-radikal.²⁴ Pendekatan dan program *good governance* tidak mengarah pada upaya fundamental dalam membongkar fondasi rezim oligarki. Kebanyakan agenda atau program antikorupsi tidak berupaya "menantang" sistem dan konstelasi politik dan ekonomi kelompok elite oligarki.²⁵ Alih-alih gerakan antikorupsi mengusung pendekatan moral bertumpu pada perbaikan individual, padahal korupsi adalah penyimpangan kekuasaan secara kolektif.²⁶

Ketiga, gerakan antikorupsi cenderung bertumpu pada golongan menengah tanpa melihat anatominya secara lebih mendalam. Sebagai tumpuan gerakan, anatomi golongan menengah di Indonesia yang terdiri dari beragam segmen penting untuk dielaborasi. Golongan menengah tumbuh dari perjalanan fase industrialisasi yang berbeda, sehingga memiliki karakter yang juga berbeda. Selain itu, kedekatan dengan rezim serta komposisi sosial majemuk membuat kepentingan dan keberpihakan golongan menengah pun beragam.

Secara umum, golongan menengah dapat dibagi ke dalam tiga segmen. Yang pertama adalah kelompok yang tumbuh dan berkembang dengan mendapatkan kemudahan dari rezim Orde Baru.²⁷ Kelas menengah dalam

²² Lihat, Budiman, "The 1998 Crisis...".

²³ Lihat, Chua, *Chinese Big Business in Indonesia...*

²⁴ Lihat, Mikaela Nyman, "Civil Society and the Challenges of the Post-Suharto Era", dalam Marco Bünte dan Andreas Ufen (eds.), *Democratization in Post-Suharto Indonesia* (New York: Routledge, 2009).

²⁵ Lihat, Robison dan Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia...*

²⁶ Lihat, Rodan dan Hughes, *The Politics of Accountability in Southeast Asia...*; Sampson, "Integrity Warriors...".

²⁷ Lihat, Gerald F Davis dan Henrich R Greve, "Corporate Elite Networks and Governance Changes in the 1980s", dalam *American Journal of Sociology*, Vol. 103, No. 1, Juli 1997, hal. 1-37; Ruth T McVey, "The Materialization of the Southeast Asian Entrepreneur", dalam Ruth T McVey (ed.), *Southeast Asian Capitalists* (New York: Studies on Southeast Asia Cornell University, 1992); Richard Robison dan David SG Goodman (2000), *The New Rich in Asia: Mobile Phones, McDonald's, and Middle Class Revolution* (London: Routledge, 1996).

segmen itu cenderung apatis, apolitis, serta mengutamakan kestabilan, keamanan, dan kepastian berusaha.²⁸ Kelompok kedua adalah segmen golongan menengah produk dari menjamurnya industri dan sektor informal. Walaupun jumlah kelompok itu terbesar, mereka rentan dalam hal "keamanan" kerja. "Status" mereka sebagai golongan menengah tidaklah stabil. Karena itu, agenda dan isu *good governance* tidak menjadi "kebutuhan" mereka yang cenderung lebih memikirkan isu pembangunan inklusif, perlindungan kerja, dan kesejahteraan sosial.

Segmen ketiga berasal dari kalangan terpelajar dan aktivis yang akrab dengan konsep dan kosakata reformasi tata kelola pemerintahan. Jumlah kelompok itu terbatas, namun mereka menjadi motor gerakan antikorupsi. Selain tidak sabar, kecenderungan kalangan itu ingin segera menghadirkan *clean politics* dan umumnya "alergi" terhadap proses politik yang dianggap sarat penyimpangan. Politik kebijakan dan penganggaran merupakan ilustrasi dari kepentingan kelompok itu.²⁹ Karakter dan isu yang mereka usung cenderung elitis ditambah diskoneksi antara kelompok ini dengan kelas bawah (terutama kelas pekerja), sehingga berpotensi menumpulkan gerakan prodemokrasi.

Ketiga faktor tersebut secara tidak langsung memformat pola gerakan antikorupsi dan karakter koalisi yang dibangun. Dengan menggunakan bingkai ideologis *good governance* yang bertumpu pada golongan menengah, maka gerakan yang dibangun adalah berkarakter "non-gerakan." Bagian selanjutnya di

bawah ini akan membahas dua karakter dominan dalam gerakan antikorupsi kontemporer di Indonesia.

Social Non-Movement

Selama ini konsepsi tentang gerakan sosial cenderung didominasi pemahaman yang merumuskan inisiatif atau entitas ini sebagai *"embedded in particular organizations and guided by certain ideologies; they pursue certain frames, follow specific leaderships, and adopt particular repertoires or means and methods of claim making"*.³⁰ Tidak mengherankan jika dalam mengulas atau mengkritisi gerakan kelompok warga, definisi seperti yang dielaborasi Charles Tilly dan Sydney Tarrow kerap dijadikan acuan.

Di luar definisi arus utama seperti penjabaran di atas, sebenarnya terdapat beberapa definisi "alternatif" untuk menjelaskan atau mengilustrasikan suatu gerakan. Salah satu di antaranya adalah definisi tentang non-gerakan sosial (*Social Non-Movement*) yang dielaborasi Asef Bayat, seorang sarjana politik Timur Tengah, sebagai *"the passive networks represent a key feature in the formation of non-movements. They refer to instantaneous communications between atomized individuals, which are established by tacit recognition of their commonalities directly in public spaces or indirectly through mass media"*.³¹

Gerakan atau inisiatif non-gerakan sosial membentuk identitas kolektif berbeda dibanding gerakan sosial umumnya. Identitas kolektif pada gerakan sosial dibentuk atau terbentuk dalam ruang kelembagaan yang inklusif dan memiliki "aturan", sehingga proses interaksi dan hubungan antar-individu mengantarkan

²⁸ Lihat, Gerry van Klinken, "Introduction: Democracy, Markets and the Assertive Middle", dalam Gerry van Klinken dan Ward Berenschot (eds.), *In Search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial Town* (Leiden: Brill, 2014).

²⁹ Lihat, Stephen Sherlock, "The Parliament in Indonesia's Decade of Democracy: People's Forum or Chamber of Cronies", dalam Edward Aspinal dan Marcus Mietzner (eds.), *Problems of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions and Society* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010).

³⁰ Lihat, Charles Tilly dan Sidney Tarrow, *Contentious Politics* (London: Paradigm Publisher, 2007).

³¹ Lihat, Asef Bayat, *Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East*. ISIM Series on Contemporary Muslim Societies (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hal 21-22.

Tabel 1 Perbandingan antara *Social Movement* dan *Social Non-Movement*³²

	Gerakan Sosial	Non-Gerakan Sosial
Ideologi	Didorong secara ideologis, karena mendaku penyatuan berbagai kelompok	Tindakan kolektif para aktor non-kolektif cenderung berorientasi pada tindakan diam-diam, karena klaim sebagian besar secara individual
Keterlibatan dengan pihak berwenang	Para pemimpin gerakan sosial biasanya menggalang konstituennya untuk menekan pihak penguasa agar memenuhi tuntutan mereka	Para aktor non-gerakan sosial langsung mempraktikkan apa yang mereka klaim, meskipun ada sanksi pemerintah. Jadi, mereka bukanlah politik protes
Watak tindakan	Para aktor biasanya terlibat dalam aksi penggalangan dan protes luar biasa yang melampaui rutinitas kehidupan sehari-hari	Non-gerakan sosial terdiri dari praktik-praktik yang digabung menjadi, dan memang merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik biasa dalam kehidupan sehari-hari
Kekuatan gerakan	Kekuatan gerakan terletak pada kesatuan para aktor, yang kemudian dapat mengancam pada gangguan dan tekanan pada penguasa.	Kekuatan non-gerakan sosial bergantung pada kekuatan <i>berjumlah besar</i> banyak orang yang secara bersamaan melakukan hal serupa, meskipun kontroversial
Mekanisme penggalangan	Dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang bertindak berdasarkan batasan politik;	Merupakan praktik umum dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh jutaan orang, meskipun tetap terfragmentasi.

pada gagasan bersama akan perubahan. Proses interaksi gagasan dan visi perubahan sosial yang terjadi dalam wahana publik mengkristal menjadi solidaritas untuk memperjuangkan perubahan secara bersama.

Sementara itu, pada non-gerakan sosial, inisiatif yang muncul sering kali sporadis dan tidak terhubung satu dengan yang lain karena tidak terjadi di dalam wahana atau ruang interaksi bersama. Jaringan yang terbentuk lebih bersifat pasif. Meski memiliki masalah yang sama dan menginginkan perubahan, tetapi gagasan dan tuntutan perubahan tidak digagas secara kolektif. Jika jaringan-jaringan itu bergerak, faktor yang mengaktivasi dan memobilisasi adalah ancaman yang dihadapi. "Perlawanan" atau penolakan yang dilakukan bercorak aksi sunyi (*quiet encroachment*) dan bertahan

dari ancaman yang datang (*defensive politics – territorial marking*).

Penjabaran Bayat mengenai *social non-movement* dapat menggambarkan karakter gerakan antikorupsi kontemporer di Tanah Air. Sifat koalisi dengan ideologi yang "tipis" atau mengusung isu moral membuat penolakan atau perlawanan terhadap ancaman korupsi tuntutan perubahan serta tidak diorganisasi secara sistematis dan berkelanjutan layaknya gerakan sosial.

Refleksi Gerakan Antikorupsi Kontemporer

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, tidak mengherankan jika politik agenda antikorupsi dominan dengan diskursus moralitas. Hal itu tampak dari pandangan dan pendekatan program KPK maupun

³² Lihat, Bayat, *Life as Politics...*, hal. 19-20.

ornop antikorupsi yang cenderung menampilkan diri sebagai penjaga moral di ranah publik. Nilai moralitas itu diposisikan secara kontras dengan politik "transaksional" yang diperagakan oleh kelompok dan partai politik. Tidak mengherankan, jika dalam diskursus publik benturan moralitas itu kerap menghiiasi konflik dengan birokrasi, parlemen atau institusi peradilan. Sebagai contoh, *tagline* KPK "Berani Jujur itu Hebat" lebih menyasar nilai moral individual ketimbang membangun solidaritas dan perlawanan kolektif terhadap korupsi. Begitu pula jargon yang digunakan dalam mendukung dan mempertahankan KPK dari gempuran kelompok oligarki, "Save the KPK, Save Indonesia", yang kental dengan nuansa keadaan darurat nasional akibat kemunduran moral bernegara.

Salah satu program yang dapat mengilustrasikan politik moral pada agenda antikorupsi kontemporer adalah inisiatif "Saya Perempuan Anti-Korupsi" (SPAK) yang digagas oleh beragam individu serta organisasi sosial kemasyarakatan. Wahana SPAK menyatukan perempuan dalam agenda antikorupsi dengan latar pendekatan gerakan sosial baru (*new social movement*). Ciri dari SPAK adalah gerakan sosial didasarkan pada individu yang tergabung dalam jaringan yang longgar secara organisasional, tujuan dan format gerakan. Sebagai gerakan secara kolektif, SPAK tidak memiliki ideologi, strategi, dan organisasi terstruktur sehingga dapat dikategorikan sebagai "bukan gerakan" (*non-movement*), terlebih jika dibandingkan dengan gerakan sosial kolektif lainnya, seperti gerakan buruh, gerakan lingkungan hidup, dan lain-lain.

Sebagai bagian dari non-gerakan sosial, SPAK menekankan aspek terkait transformasi pribadi agen, anggota, serta simpatisan dalam hal ini perempuan untuk memulai perubahan dengan memengaruhi serta mengubah moralitas keluarga masing-masing. SPAK menegaskan norma-norma sosial tentang peran perempuan sebagai penjaga moral keluarga. Dalam logika SPAK, perempuan atau ibu yang

tercerahkan karena mengadopsi kerangka moral antikorupsi kemudian memengaruhi pandangan keluarganya terhadap praktik korupsi, sehingga berpotensi menjadi benih perubahan sosial.²⁰

Sejatinya, logika dan pendekatan moral SPAK merupakan pengulangan strategi atau upaya uji coba yang dilakukan KPK setidaknya dalam dekade terakhir. Beberapa program KPK sebelumnya yang juga membawa pesan moral, di antaranya "pakta integritas", "kantin kejujuran", dan "tunas antikorupsi." Program-program tersebut menyediakan wahana non-konfrontatif bagi KPK untuk bermitra dengan lembaga-lembaga pemerintah, termasuk legislatif dan yudikatif, partai politik serta kelompok bisnis. Sadar bahwa pendekatan represif penegakan hukum saja tidak mampu melakukan perubahan fundamental atas relasi dan praktik koruptif di tubuh pemerintahan, sehingga diperlukan pendekatan "lunak" dan non-kontroversial.

Penggunaan isu moral antikorupsi agaknya mampu "meredam" kegarangan KPK yang telanjur menjadi momok bagi penyelenggara negara, sehingga tidak menimbulkan resistansi. Dengan pendekatan moralitas, agenda dan program antikorupsi lebih bisa diterima serta tidak menimbulkan kekhawatiran kelompok-kelompok yang selama ini menjadi sasaran upaya antikorupsi. Dengan mengusung isu moral, aktivitas SPAK mampu merangkul aktivis dari golongan menengah, kaum profesional, politikus, aparat penegak hukum, serta birokrat. Pendek kata, SPAK mampu menyediakan instrumen "non-represif" yang memungkinkan kelompok-kelompok dengan beragam latar belakang dan kepentingan terlibat dalam gerakan moral memerangi korupsi.

Namun demikian, dalam jangka panjang, koalisi yang disatukan dengan agenda antikorupsi moral berasal dari beragam latar belakang sosial, tetapi dangkal dalam aspek ko-

²⁰ Wawancara penulis dengan aktivis SPAK serta observasi terhadap kegiatan-kegiatan SPAK.

hesivitas ideologi, gagasan dan proyeksi transformasi yang hendak dituju.³⁴ Koalisi moralitas cenderung sulit “naik kelas” menjadi koalisi yang lebih progresif dalam hal tuntutan dan juga sulit mencapai kesepakatan atas tujuan perubahan bersama serta strategi untuk mewujudkannya. Hal tersebut sangat mudah dipahami, karena jika agenda moralitas seperti itu ditingkatkan pada aspek yang mempertanyakan ketimpangan penguasaan aset, alokasi sumber daya publik, dan konfigurasi kelompok politik, maka serta-merta akan memunculkan kekhawatiran bagi individu serta kelompok yang selama ini menikmati sistem koruptif.³⁵

Selain itu, individu maupun organisasi masyarakat sipil sebenarnya memegang “panji-panji” nilai publik (*public virtue*) dibandingkan otoritas moral, yang umumnya menjadi “monopoli” tokoh keagamaan atau organisasi agama. Jika muatan moralitas bergeser pada muatan moralitas keagamaan, maka peng gagasan gerakan moral ini akan terpinggirkan. Begitu pula sebaliknya. Jika muatan moralitas lebih mengarah pada nilai-nilai bersifat sekuler, maka individu maupun lembaga keagamaan akan kehilangan relevansinya sehingga berpotensi menjadi tidak aktif atau bahkan meninggalkan koalisi tersebut.

Upaya antikorupsi di Indonesia, serta di Asia Tenggara secara umum, sering didukung oleh yang disebut Rodan dan Hughes sebagai ideologi “akuntabilitas moral.” Yang dimaksud dengan akuntabilitas moral itu adalah bahwa agenda antikorupsi di Asia Tenggara telah menggunakan ide-ide sosial konservatif tentang seperti apa seharusnya masyarakat dan politik. Ideologi akuntabilitas moral dapat mengambil

berbagai bentuk. Mereka sering nasionalis (“cinta Indonesia, benci korupsi”), atau “budayawan” mengacu kembali pada budaya besar yang hilang atau agama (“Muslim yang baik tidak korupsi”). Masalah dengan kerangka ideologis semacam itu untuk gerakan antikorupsi adalah, sementara koalisi moral dapat memiliki agenda yang ambisius dan bahkan radikal, mereka cenderung menuju konservatisme sosial dan merumuskan hierarki sosial yang sudah mapan, termasuk dalam hubungan gender.

Sekapur Sirih: Memperdalam Wacana dan Memperluas Aliansi

Walaupun kontribusi gerakan antikorupsi terhadap demokratisasi dan restrukturisasi penguasaan aset dan sumber daya masih minim, tetapi “*oligarchical democracy*” tidaklah statis dan final. Demokrasi elektoral membatasi otoritas elite berkuasa, karena kontestasi pemilu mengharuskan para elite untuk saling bersaing di antara mereka. Demokratisasi elektoral membuka ruang-ruang politik tempat beragam kelompok kepentingan, termasuk kelompok warga terorganisasi, dapat memperjuangkan agenda perubahan sosial dan politik.³⁶ Perubahan struktur dan konfigurasi ekonomi membuat oligarki tidak bisa lagi hanya bertumpu pada kekuatan finansial dan kemampuan koersi semata, tetapi juga harus menggunakan pendekatan/isu populis untuk dapat memenangkan kontestasi pemilu.³⁷ Perubahan struktur politik (*opportunity structures*) membuka ruang partisipasi dan interaksi warga yang memungkinkan terjadinya dialog gagasan, sehingga

³⁴ Lihat, Rodan dan Hughes, *The Politics of Accountability in Southeast Asia...*

³⁵ Lihat, William Reno, *Corruption and State Politics in Sierra Leone (African Studies)* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); Michael Johnston dan Sahr J Kpundeh, (2005). *Building A Clean Machine: Anti-Corruption Coalition and Sustainable Reform*. World Bank Policy Research Working Paper No. 3466, Januari 2005.

³⁶ Lihat, Luky Djani dan Olle Tornquist, *Dilemma of Populist Transactionalism* (Yogyakarta: Polgov UGM, 2016).

³⁷ James Manor, “Post-clientelist Initiatives”, dalam Kristian Stokke dan Olle Tornquist (eds.), *Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics* (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2013), hal. 243-253.

dapat mendukung perubahan atau transformasi (*transformative democracy*).³⁸

Sesungguhnya perubahan politik—pemilu multipartai dan desentralisasi—membuka peluang demokratisasi yang lebih luas dan bermakna. Pemilu yang kompetitif membawa perubahan pada karakter dan strategi elite dalam menduduki kekuasaan. Untuk berkuasa, para oligark wajib mengumpulkan suara pemilih sebanyak mungkin yang tidak bisa diraih hanya menggunakan pendekatan klientelistik, intimidasi, atau bahkan jual-beli suara semata.³⁹ Hal demikian membuat beberapa oligarki mengusung agenda atau isu populis demi meraih dukungan konstituen. Mulai berpalingnya elite politik pada isu populis membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk mengusung dan menegosiasikan agenda perubahan. Dengan kata lain, kecenderungan meningkatnya pendekatan populis membuka celah bagi kelompok masyarakat sipil untuk melakukan negosiasi atau mengusulkan agenda perubahan.

Karena itu, agenda krusial ke depan adalah membangun visi dan arah gerakan baru. Orientasi dari gerakan prodemokrasi (termasuk anti-korupsi) harus ditujukan untuk membongkar fondasi rezim hibrida.⁴⁰ Salah satu sasaran Gerakan Anti-Korupsi (GAK) adalah memperbaiki ketimpangan relasi politik-sosial-ekonomi.⁴¹ Reorientasi konseptual gerakan antikorupsi perlu melibatkan dua dimensi: politik dan eko-

nomi.⁴² Pembangunan visi dan arah gerakan baru ditujukan untuk melakukan perubahan sistem politik dan ekonomi.

Untuk melakukan perubahan sistem politik dan ekonomi diperlukan perluasan basis dan aliansi gerakan (*broad-based campaign*). Perubahan membutuhkan kesepahaman dan kesepakatan di antara kelompok prodemokrasi akan agenda perubahan bersama yang struktural dan strategis. Kerja tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh orop semata. Sentra gerakan memang tidak terpusat, namun bertumpu pada sejumlah pusat yang memiliki fungsi berbeda saling menguatkan (komplementer) dan juga lintas isu atau sektor. Jaringan kerja sama lintas isu dan sektor dengan *precariat*, misalnya, mutlak diperlukan. Agenda dan isu yang diusung dicapai melalui konsensus atas kebutuhan perubahan dan juga dengan “membaca” konstelasi politik seperti, misalnya, reaksi kelompok politik atas suatu isu perubahan. Hal lain adalah dengan mengidentifikasi konsentrasi kekuasaan dan kapital pada beberapa jenjang/level (jaringan patronase, *privileges*, dominasi sosial, dan sebagainya).

Langkah selanjutnya adalah memperbaiki sistem representasi politik. Sebagaimana diketahui, defisit demokrasi di Indonesia salah satunya diakibatkan oleh lemahnya representasi politik. Argumentasi itu dikemukakan oleh beberapa ilmuwan politik, seperti Olle Törnquist⁴³ bahwa buruknya relasi antara pemilih dan politikus (*elected politician*) membuat kualitas demokrasi di Indonesia rendah secara substansial. Membangun kerja sama dengan sekutu politik perlu dijajaki agar agenda perubahan (dan

³⁸ Lihat, Kristian Stokke dan Olle Törnquist, “Transformative Democratic Politics”, dalam Kristian Stokke dan Olle Törnquist (eds.), *Democratisation in the Global South: The Importance of Transformative Politics* (Basingstoke: Palgrave, 2013).

³⁹ Lihat, Manor, “Post-clientelist...”.

⁴⁰ Lihat, Milkaela Nyman, “Civil Society and the Challenges of the Post-Suharto Era”, dalam Marco Bünte dan Andreas Ufen (eds.), *Democratisation in Post-Suharto Indonesia* (New York: Routledge, 2009); Charles Tilly, “To Explain Political Processes”, dalam *American Journal of Sociology*, Vol. 100, No. 6, 1995, hal. 1594-1610.

⁴¹ Lihat, Munglu-Pippidi, “Corruption: Diagnosis and ...”.

⁴² Lihat, Todd Landman, *Map-Making and Analysis of the Main International Initiatives on Developing Indicators on Democracy and Good Governance* (University of Sussex, Human Rights Center, 2003).

⁴³ Lihat, Olle Törnquist, “Introduction: The Problem is Representational Towards an Analytical Framework”, dalam Olle Törnquist, Neil Webster, dan Kristian Stokke (eds.), *Rethinking Popular Representation* (New York: Palgrave MacMillan, 2009).

antikorupsi) menjadi agenda kerja dalam pemerintahan. Interaksi dan kerja sama dengan kelompok-kelompok politik ditujukan untuk menjembatani "tali mandat" dengan konstituen dan perumusan agenda kebijakan secara kolektif.

Salah satu upaya untuk memperkuat representasi adalah dengan membangun aliansi bersama (*broader alliance*) antara kelompok masyarakat sipil, organisasi sektoral, dan partai politik guna memperbaiki kerenggangan representasi politik.⁴⁴ Interaksi antara kelompok masyarakat sipil dengan kelompok politik di beberapa negara ditengarai sebagai salah satu kunci perbaikan representasi politik.⁴⁵ Organisasi masyarakat sipil, seperti ornop atau serikat buruh, dipandang sebagai lembaga yang memiliki komitmen terhadap demokrasi, tetapi interaksi dan intervensi mereka dalam proses politik, baik di lembaga legislatif maupun pemerintah, masih sangat terbatas. Hal itu disebabkan, terutama di negara-negara demokrasi baru atau pasca-otoritarian, politik elektoral dan politik pemerintahan umumnya dikuasai oleh kaum elite yang memiliki sumber daya.⁴⁶

Sebagai penutup, gerakan antikorupsi perlu direorientasi untuk memperluas demokratisasi dengan titik tumpu perbaikan representasi politik populer dengan tema kesejahteraan sosial. Reorientasi itu dapat menjadi pintu masuk kelompok-kelompok masyarakat untuk menjadikan demokrasi sebagai arena pertaruhan (*contested democracy*) gagasan dan kepentingan.⁴⁷ Diusungnya isu dan agenda populis dapat menjadi celah bagi perubahan secara lebih mendasar,⁴⁸ tetapi menyentuh dimensi struktural, utamanya untuk mengikis dominasi oligarki pada penguasaan ekonomi dan institusi politik.⁴⁹ Sekali lagi, kerja itu tidak bisa dilakukan hanya oleh ornop. Fragmentasi dan polarisasi harus dikikis sehingga "gerakan sosial baru" bisa bersinergi dengan "gerakan sosial lama" dalam agenda dan isu bersama.⁵⁰ Dengan demikian, agenda dan isu antikorupsi dapat bersinergi dengan agenda dan isu gerakan sosial lainnya. *

⁴⁴ Lihat, Luky Djani, *Representasi Politik: Relasi Imaginer Konstituen dan Politikus?* (Jakarta: Institute for Strategic Initiatives, 2016).

⁴⁵ Lihat, Olle Törnquist, Neil Webster, dan Kristian Stokke (eds.), *Rethinking Popular Representation* (New York: Palgrave MacMillan, 2009). Tak dapat dimungkiri bahwa pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) sebagai hasil dari pergulatan dan aktivitas *civil society*, tetapi hal ini belum tentu bercaitan langsung pada penguatan representasi politik. Walaupun karakter dan tata kelola kelompok masyarakat sipil bersendikan prinsip demokrasi, tetapi, menurut Bjorn Beckman, organisasi masyarakat sipil bukanlah representasi dari kehendak publik (*popular will*); lihat, Bjorn Beckman, "Trade Unions and Popular Representation: Nigeria and South Africa Compared", dalam Olle Törnquist, Neil Webster, dan Kristian Stokke (eds.), *Rethinking Popular Representation* (New York: Palgrave MacMillan, 2009).

⁴⁶ Lihat, Beckman, "Trade Unions and Popular Representation...".

⁴⁷ Lihat, Olle Törnquist, M Tharakan, J Chathukulan, dan N Quimpo, "Popular Politics of Representation: New Lessons from the Pioneering Projects in Indonesia, Kerala and the Philippines", dalam Olle Törnquist, Neil Webster, dan Kristian Stokke (eds.), *Rethinking Popular Representation* (New York: Palgrave MacMillan, 2009).

⁴⁸ Lihat, Kristian Stokke dan Olle Törnquist, "Transformative Democratic Politics", dalam Kristian Stokke dan Olle Törnquist (eds.), *Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics* (New York: Palgrave MacMillan, 2013).

⁴⁹ Lihat, Robison dan Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia...: Kevin Hewison dan Garry Rodan, The Ebb and Flow of Civil Society and the Decline of the Left in Southeast Asia* (London: Routledge, 1996).

⁵⁰ Lihat, John Harriss, Kristian Stokke, dan Olle Törnquist (eds.), *Politicizing Democracy: Local Politics and Democratization in Developing Countries* (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2004).

